

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi umat manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia. Dampak dari masalah tersebut dapat meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, meskipun masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa keberadaan kemiskinan merupakan masalah bagi aparat terkait. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari karena bagaimana mereka merasa dan hidup dalam kemiskinan (Suparlan, 1984).

Kemiskinan biasanya digambarkan sebagai ketidakmampuan keluarga atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan dan transportasi; kurangnya akses ke layanan pendidikan dan tingkat pendidikan yang rendah; kurangnya akses ke layanan kesehatan modern, sehingga morbiditas dan angka kematian yang cukup tinggi, dan kurangnya akses modal komersial karena tidak memiliki agunan. Pada banyak keluarga dan komunitas miskin, terjadi sebuah lingkaran kemiskinan yang menahun, yang kemudian dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan. Dimana kemiskinan keluarga dan komunitas tersebut diturunkan kepada anak cucunya secara berkesinambungan.

Indonesia salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi di beberapa faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang rendah. Ukuran kemiskinan tidak hanya hidup dalam kemiskinan dan tingkat pendapatan rendah,

tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan, dan gerakan yang adil di hadapan hukum dan sebagainya (Adisasmita, 2005).

Langkah-langkah strategis dan berkelanjutan yang tepat juga diperlukan untuk memecahkan masalah. Beberapa variabel yang digunakan untuk analisis menghasilkan serangkaian strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Sebagian besar program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan belum terlalu berhasil karena penyimpangan dalam pelaksanaan dari rencana mereka. Sebagaimana banyak negara lain seperti Amerika Serikat telah berusaha dengan beberapa perbedaan dalam pendekatan dan penekanan mereka, Indonesia juga telah melakukan sejumlah upaya. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih menekankan pada aspek ekonomi daripada aspek sosial, budaya, hukum bahkan agama (Prawoto, 2009).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang harus dicarikan solusi untuk mengentaskannya karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dikarenakan adanya kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, karena permasalahannya yang kompleks, subjektif dan, komparatif. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk, 2008).

Pentingnya persoalan kemiskinan untuk segera diatasi karena berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan salah

satu faktor penghambat dalam terciptanya kesejahteraan sosial. Selain itu kemiskinan juga menyebabkan terjadinya kerusakan atau degradasi sumber daya alam yang apabila dibiarkan akan menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. (Tukiran dkk, 2010).

Kemudian pentingnya masalah kemiskinan untuk segera diatasi adalah berkaitan dengan pemenuhan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal ini seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwasanya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pendekatan pengentasan kemiskinan di Indonesia maupun di DIY, cenderung lebih menekankan pembebasan masyarakat miskin dari indikator-indikator konvensional (pemenuhan sandang, pangan, dan papan) yang bersifat serba agregat dan mengabaikan pentingnya pembebasan masyarakat miskin dari hal-hal yang non agregat untuk menumbuhkan *self-sustaining capacity*, seperti: harga diri (*self esteem*), kebanggaan (*dignity*), kemandirian (*independence*), pengakuan (*recognition*) dan kebebasan (*freedom*). Sebagai konsekuensi logisnya pengentasan kemiskinan hanya melestarikan atau memperpanjang mata-rantai ketergantungan daripada sebagai upaya memandirikan masyarakat miskin melalui usaha-usaha produktif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan dari tahun 2010-2019, menggunakan keempat variable dalam satu judul penelitian yang belum ada sebelumnya yaitu pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan upah minimum kota/kabupaten. Alasan lain yang digunakan untuk

mengambil periode waktu dari 2010-2019, dikarenakan ingin melakukan penelitian dengan jangka waktu yang sangat baru 2020 dan 2021, namun terkendala belum lengkapnya beberapa variable seperti tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota untuk tahun 2020 dan 2021.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kenyataan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009).

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Menurut Rintuh (2003), kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidupnya. Ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang melampaui garis kemiskinan yang ditetapkan, sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya.

Kemiskinan ditentukan sebagai ketidakmampuan yang dibutuhkan karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau mengendalikan sumber daya ekonomi, oleh karena itu pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan menjadi

penting sumber bagi pemerintah (Firdaus, 2014). Menurut Engle (2008), membahas kemiskinan ekonomi berdasarkan ukuran pendapatan, "miskin" hanya berarti materi dan kesehatan tetapi juga kemampuan, seperti sosial, identitas budaya, rasa hormat, martabat, informasi, dan pendidikan. Keterkaitan antara kemiskinan dan pendidikan adalah sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan (Suryawati, 2005).

Masalah kemiskinan masih terus menjadi momok masalah besar yang sedang dihadapi Indonesia. Tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia mengalami kecenderungan menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2014-2019 mengalami penurunan dalam jumlah penduduk miskin, tetapi meskipun mengalami penurunan persentase penduduk miskin masih 9-11 persen. Dimana pada tahun 2014 terdapat 11,25% penduduk miskin di Indonesia dan selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 27,77 juta orang (10,64%) penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2019 sebanyak 24,79 juta orang (9,22%) penduduk miskin di Indonesia, turun sebesar 1,42% dari tahun 2017. Penurunan penduduk miskin tersebut diakibatkan karena stabilnya laju inflasi, harga-harga kebutuhan pokok, dan naiknya upah buruh.

Secara nasional, angka kemiskinan Indonesia 2014-2019 persentasenya menurun. Penurunan tersebut tak lepas dari upaya dan usaha keras pemerintah dalam menanggulangi dan membantu kemiskinan melalui berbagai program pro rakyat dan memberikan efek positif untuk meningkatnya kemampuan masyarakat. Pemerintah juga harus selalu menstabilkan harga-harga kebutuhan bahan pokok, apabila terus mengalami kenaikan terus menerus akan menyebabkan inflasi dan

berakibat kepada rakyat atau penduduk yang tergolong tidak miskin dengan berpenghasilan sekitar garis kemiskinan akan bergeser posisi menjadi penduduk miskin.

TABEL 1. 1
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa tahun 2019

No.	Provinsi	Persentase Kemiskinan (%)
1	DKI Jakarta	3,42
2	Banten	4,94
3	Jawa Barat	6,82
4	Jawa Tengah	10,58
5	D.I Yogyakarta	11,44
6	Jawa Timur	10,20

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

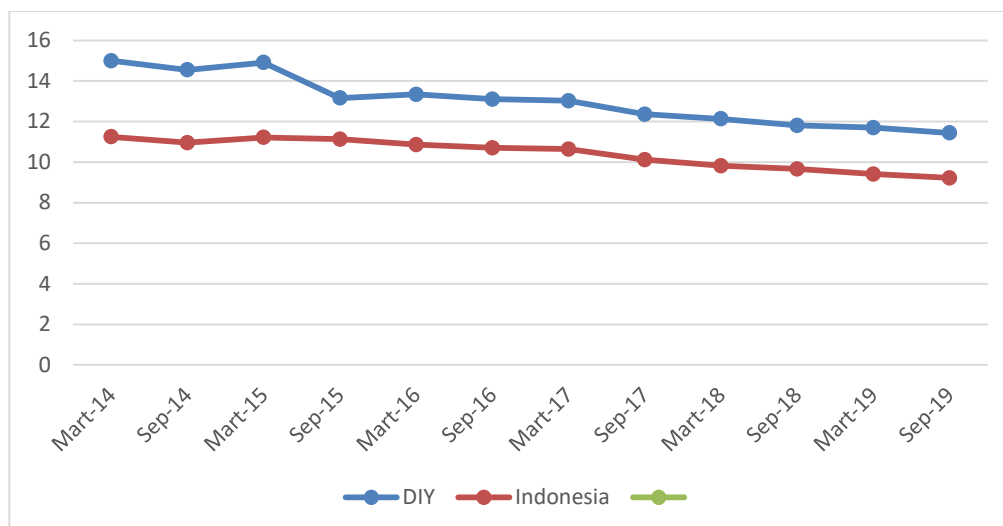
Pusat pemerintahan Indonesia ada di pulau Jawa, tetapi pulau Jawa adalah tempat berkumpulnya orang-orang termiskin di Indonesia. Pulau Jawa memiliki 6 provinsi, antara lain DKI Jakarta, Banten, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Berdasarkan tabel di atas, dibandingkan dengan provinsi lain, DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu 3,42%. Disusul Provinsi Banten (4,94%) dan Provinsi Jawa Barat (6,82%). Tiga provinsi dengan persentase tingkat kemiskinan tinggi adalah D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. D.I Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 11,44%. Kemudian provinsi tertinggi kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase 10,58%.

Selain itu, provinsi tertinggi ketiga adalah Jawa Timur sebesar 10,20%. D.I Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi

dibandingkan provinsi lain di pulau Jawa. Terlihat pula, bahwa persentase kemiskinan D.I Yogyakarta masih berada di atas persentase kemiskinan nasional. Persentase kemiskinan D.I Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 11,44%, sedangkan persentase kemiskinan nasional sebesar 9,22%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di D.I Yogyakarta masih cukup besar.

Masalah kemiskinan ini tak hanya di nasional saja, tetapi merambah juga ke setiap daerah di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang penduduk miskinnya masih cukup terbilang tinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Memiliki persentase penduduk miskin terhadap penduduk DI Yogyakarta selama periode 2014-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat pendapatan serta tingkat pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Tetapi, penurunan penduduk miskin ini dirasakan masih terlalu kecil, jauh dibawah yang diharapkan pemerintah DI Yogyakarta yaitu turun 2% per tahunnya.

Penyebab angka kemiskinan tinggi berpusat pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, pasar yang tidak sempurna, dan kurangnya dana menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang rendah bagi mereka. Pendapatan yang rendah akan mempengaruhi tabungan yang rendah dan investasi yang rendah, investasi yang rendah akan menyebabkan keterbelakangan dan sebagainya (Kuncoro, 2004). Di tambah di tahun 2020 hingga 2021 adanya covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di DIY meningkat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

GAMBAR 1. 1
 Persentase Penduduk Miskin D.I Yogyakarta dan Nasional tahun
 2014-2019

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta masih cukup jauh terletak di atas tingkat kemiskinan nasional yaitu Indonesia. Tingkat kemiskinan di wilayah D.I Yogyakarta pada periode September 2019 tercatat sebesar 11,44% sementara itu, untuk tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22% pada periode September 2019. Bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di Indonesia, angka kemiskinan yang ada di D.I Yogyakarta masih cukup jauh dan lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta harus terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Isu kemiskinan selalu menjadi tugas utama pemerintah dalam pembangunannya. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, secara efektif memenuhi kebutuhan hidup dasar warga, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Keberhasilan Pemprov D.I Yogyakarta dalam

penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan yang relatif tinggi, di atas *hard core* atau di atas 10%.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*World Bank*, 2004).

Menurut *World Bank*, salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam surah QS. Ar-Ra'd ayat 11, yaitu :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ.

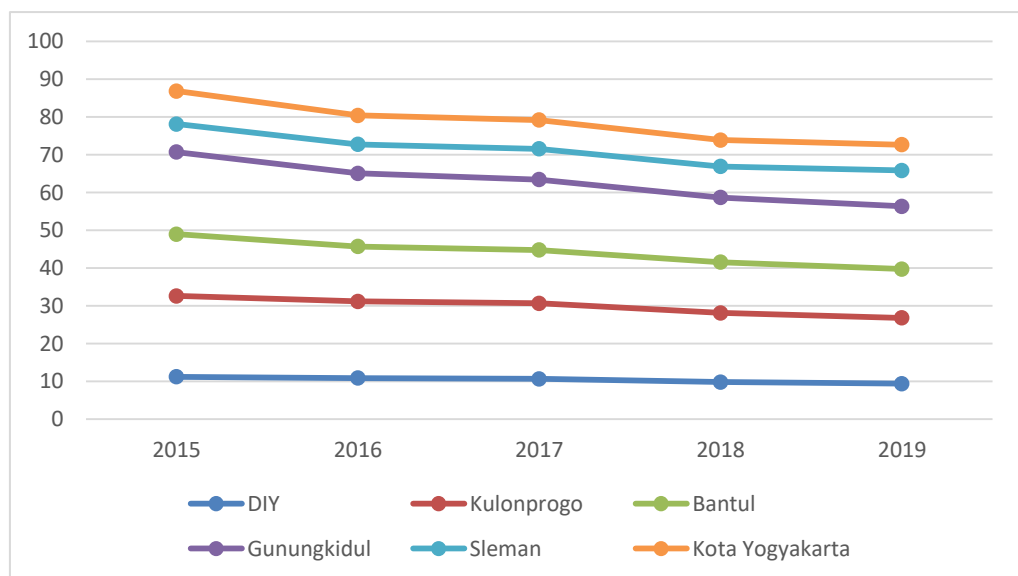
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Adapun tafsir menurut At-Thabari, maksud ayat Ar- Ra'd ayat 11 justru menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri.

Allah SWT juga telah memberikan perintah kepada umat manusia untuk bekerja dan memakmurkan dunia sebagaimana pada firman-Nya yaitu:

“Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja).” (Q.S An-Naba:11). “Kami telah menjadikan untukmu semua didalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan (bekerja); tetapi sedikit sekali diantaramu yang bersyukur.” (Q.S A’raf:10). Di dalam Hadits Riwayat Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi juga disebutkan bahwa “Mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardhu.”

Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah- masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

GAMBAR 1. 2
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta tahun 2015-2019.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan di wilayah D.I Yogyakarta selama periode 2015-2019 menurun secara signifikan. Sesuai dengan data dari BPS pada bulan September 2019, garis kemiskinan D.I Yogyakarta

tercatat Rp.449.485/ kapita per bulan. Artinya garis kemiskinan menurun 4,04% dari bulan maret kondisinya sebesar Rp.432.025 perkapita perbulan.

Sesuai data, garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 – 2019 menempati pada posisi kedua terendah di D.I Yogyakarta. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan pada garis kemiskinan di Kulon Progo. Apabila tahun 2015, garis kemiskinan Kulon Progo posisi pada angka Rp.273.436/ kapita per bulan maka, pada tahun 2016 garis kemiskinannya naik menjadi 8,75 persen menuju Rp.297.353/kapita per bulan. Selanjutnya garis kemiskinan di Kabupaten ini mengalami penurunan terus dalam rentang 3,30% - 5,13% setiap tahunnya.

Pada tahun 2015 – 2019, tepat Kabupaten Bantul mempunyai garis kemiskinan yang merupakan berada diposisi terendah ketiga di D.I Yogyakarta. Persis seperti dua kabupaten sebelumnya, laju kemiskinan di Kabupaten ini juga mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2016. Pada tahun tersebut, garis kemiskinan menurun sebesar 6,25% menjadi Rp.332.057/ kapita per bulan. Selanjutnya, menurun yang signifikan kembali terjadi pada tahun 2018 dimana, garis kemiskinannya menurun sebesar 6,33% menjadi Rp.369.480/ kapita per bulan. Kemiskinan di Kabupaten Bantul tersebut hampir serupa dengan kemiskinan ada di Kabuputen Sleman yang merupakan posisi tertinggi kedua di D.I Yogyakarta.

Secara rata-rata penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul yaitu 5,12% pertahun pada selang waktu 5 tahun terakhir. Pada kurun waktu 2015 – 2019, di Sleman adalah Kota/Kabupaten dengan kemiskinan posisi tertinggi kedua di D.I Yogyakarta. Secara umum, pola kemiskinan di Kabupaten Sleman hampir sama

dengan ketiga kabupaten lainnya di D.I Yogyakarta. Pada tahun 2015, garis kemiskinan di Kabupaten Sleman sebesar Rp.318.312/ kapita per bulan sampai dengan tahun 2019, kemiskinan Sleman juga cukup mengalami penurunan menjadi Rp.382.868/ kapita per bulan.

Garis kemiskinan yang ada di kota Yogyakarta adalah yang paling tertinggi di di wilayah provinsi D.I Yogyakarta selama rentang waktu 2015 – 2019. Pada tahun 2015, garis kemiskinan di Kota Yogyakarta yaitu Rp.383.966/kapita per bulan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki pengeluaran sebanyak Rp.380.000 perbulan, tidak akan dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila berada di kabupaten/kota di wilayah D.I Yogyakarta.

Akan tetapi, penduduk tersebut akan terbilang sebagai penduduk miskin apabila tinggal di Kota Yogyakarta. Selain tercatat sebagai daerah dengan garis kemiskinan yang paling tinggi di D.I Yogyakarta, laju penurunan garis kemiskinan Kota Yogyakarta juga merupakan yang tertinggi di D.I Yogyakarta. Selama kurun waktu 2015-2019, secara rata-rata laju penurunan pada garis kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 6,61% pertahun.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator terpenting untuk mengevaluasi kinerja suatu perekonomian, terutama analisis hasil pembangunan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah. Jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, maka perekonomian akan tumbuh. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah terus

meningkat, berarti perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007).

Penelitian yang telah dilakukan Riyanto (2019) menemukan bahwa beberapa perekonomian merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi kemakmuran. pertumbuhan ekonomi dalam penelitian bahwa, pertumbuhan ekonomi individu berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0,0059 terhadap tingkat kesejahteraan.

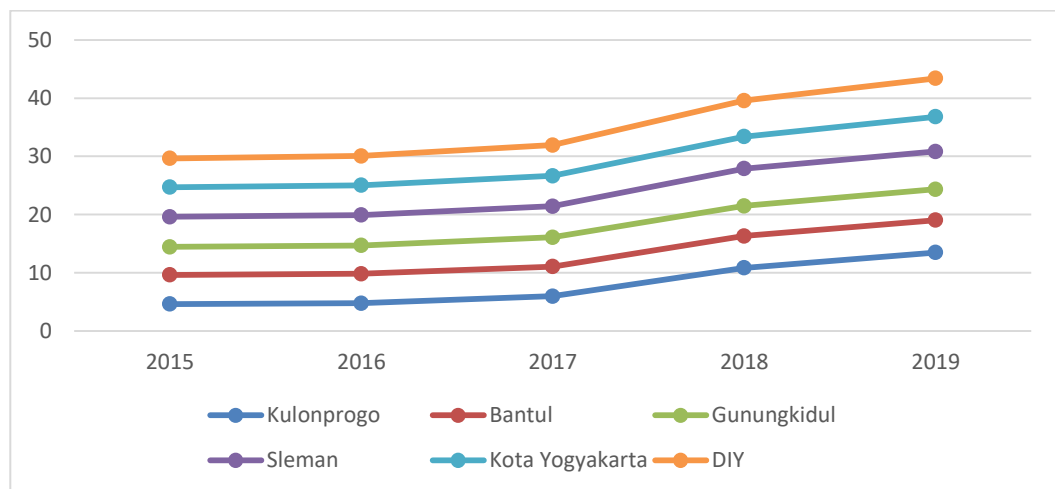
Menurut Anggit dan Fitri (2012) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan pertumbuhan PDRB akan menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Aria dan Nenek (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan kesejahteraan akan menyebabkan ketimpangan ekonomi di beberapa daerah.

Menurut Stephanie (2017) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Dalam studi tersebut Pradeep, (2008) menunjukkan provinsi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi mencapai tingkat kemiskinan yang lebih cepat. Sementara penelitian yang dilakukan Akoum (2008) memperoleh hasil yang tidak konkrit antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, berbagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Penelitian telah dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwasanya ada hubungan yang negatif antar pertumbuhan ekonomi terhadap

kemiskinan. Hal ini berarti, apabila pertumbuhan ekonomi melonjak, maka kemiskinan akan menurun. Hubungan ini terlihat menunjukkan pentingnya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga adalah syarat wajib untuk berkurangnya tingkat kemiskinan (Siregar, 2008).

Sementara itu, Farwati (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan bervariasi untuk berbagai jenis pengeluaran. Pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan melalui pengurangan ketimpangan pendapatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

GAMBAR 1.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta, tahun 2015-2019

Terlihat ada perbedaan pertumbuhan ekonomi diantar kabupaten/ kota masih tergantung pada sektor sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya serta teknologi yang ada. Sesuai gambar di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan dari 4,95% menjadi 6,59%. Naiknya pertumbuhan ekonomi yang terbukti signifikan

ini belum ditemani dengan penurunan angka kemiskinan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini naik dibanding periode sebelumnya di tahun 2018, yakni sebesar 6,20%, hal ini disebabkan karena pertumbuhan positif dari berbagai sektor.

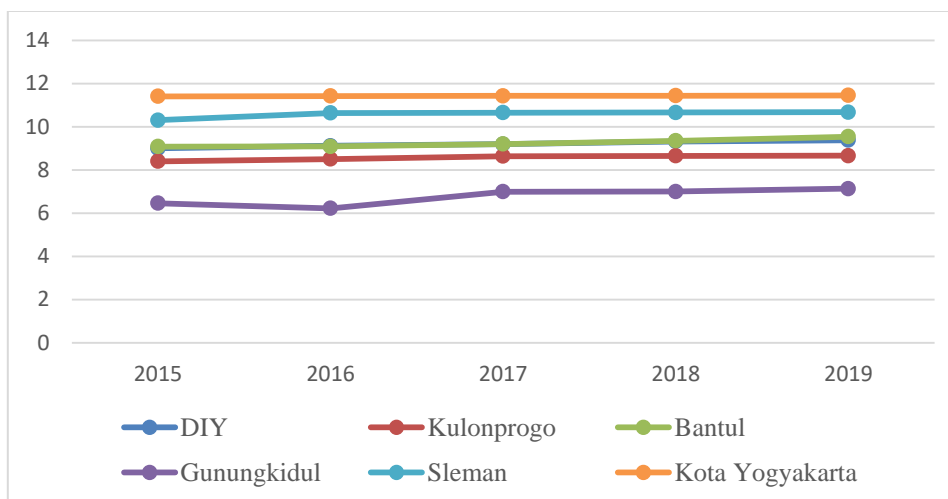
Menurut kabupaten/kota di D.I Yogyakarta, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tertinggi malah Kabupaten Kulon Progo sebesar (13,49%) dan Kabupaten Sleman (6,49%) dan terendah yaitu Kabupaten Gunung Kidul (5,33%). Wilayah di Provinsi D.I Yogyakarta hanya mencakup 4 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Gunung Kidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah D.I Yogyakarta, ternyata pada tahun 2019 masih menempati urutan terakhir. Hal ini tak terlepas pada kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Kidul yang masih bergantung pada sektor pertanian. Masih jauh berbeda dengan Kota Yogyakarta sebagai ibu kota D.I Yogyakarta, Sebab, kota Yogyakarta adalah pusatnya pemerintahan dan ditunjang oleh parasarana dan prasarana serta teknologinya yang telah memadai.

Suatu negara tidak dapat berkembang dengan baik tanpa pendidikan. Pendidikan adalah proses dua arah, satu sisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sisi lainnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas. Pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat dan mendorong perekonomian berkembang melalui keterampilan dan pengetahuan (Raja, 2005).

Tingkat pendidikan di dalam penelitian ini bisa dilihat dari rata-rata lama/masa sekolah. Indikator tersebut dimanfaatkan untuk melihat kualitas penduduk berdasarkan tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan.

Semakin tinggi taraf pendidikan seseorang, maka pengetahuan, wawasan, dan keahlian juga dapat meningkat, sehingga dapat juga mendorong meningkatnya produktivitas seseorang.

Berdasarkan data dari BPS rata-rata lama/masa sekolah penduduk di D.I Yogyakarta, terjadi peningkatan yaitu dari 9,00 pada tahun 2015 menjadi 9,38 pada tahun 2019 atau setara dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun meningkat, pencapaian angka untuk rata-rata lama/masa sekolah penduduk D.I Yogyakarta masih terbilang rendah dan belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta belum mencapai target pendidikan 15 tahun yang telah diusulkan *United Nations Development Program* (UNDP).



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

GAMBAR 1. 4

Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi D.I Yogyakarta, tahun 2015-2019

Rata-rata lama/masa sekolah di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tertinggi yaitu Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, rata-rata lama/masa sekolah di Kota Yogyakarta mencapai 11,45 tahun, sedangkan rata-rata lama/masa sekolah di Kabupaten Gunung Kidul menduduki posisi terendah. Tahun 2019 rata-rata lama/masa sekolah Kabupaten Gunung Kidul hanya 7,13 tahun dibandingkan dengan tingkat provinsi yang telah mencapai 9,38 tahun.

Hal ini dikarenakan keinginan warga Kabupaten Gunung Kidul untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangat rendah. Masih banyak warga Kabupaten Gunung Kidul yang terjun langsung untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta masih selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah bagi masyarakat. Salah satunya yaitu dengan menyukseskan program-program wajib dan

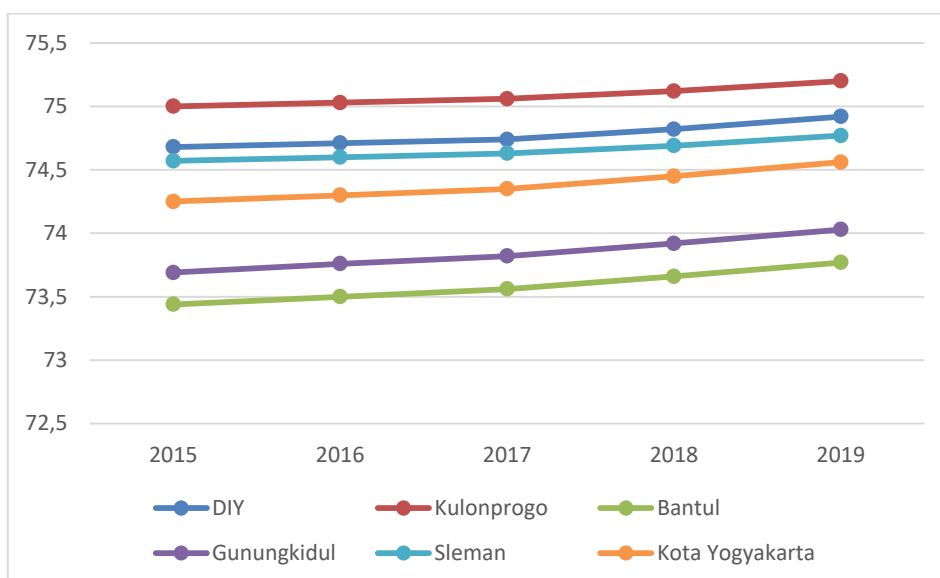
harus belajar minimal 12 tahun, namun untuk dapat mencapai hal tersebut harus ada yang berperan penting dari berbagai pihak.

Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar modal manusia bagi pembangunan ekonomi, modal manusia tidak lain adalah investasi jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat. Peningkatan produktivitas merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang secara inheren sangat produktif akan terhindar dari kemiskinan. (Mulyadi, 2003).

Menurut Suryawati (2005), faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah kesehatan. Masalah kesehatan adalah masalah yang cenderung dihadapi oleh masyarakat miskin, karena kendala keuangan dalam upaya mereka untuk tetap sehat dan memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Tingkat kesehatan akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan erat kaitannya dengan kemiskinan.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan pembangunan, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Orang yang sehat akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi, tingkat pendapatan yang tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan banyak faktor positif lainnya. Menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) D.I Yogyakarta, kesehatan merupakan salah satu faktor penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu indikator kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup

(AHH). Semakin naiknya angka harapan hidup, maka semakin pula menunjukkan derajat pada sektor kesehatan suatu daerah semakin meningkat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

GAMBAR 1. 5

Angka Harapan Hidup di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2015-2019

Perkembangan angka harapan hidup di D.I Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan tren meningkat. Dari 74,68 tahun di tahun 2015 meningkat menjadi 74,92 tahun di tahun 2019. Angka harapan hidup di kabupaten/kota di D.I Yogyakarta tertinggi yaitu Kabupaten Kulon Progo dan terendah yaitu Kabupaten Bantul. Angka harapan hidup yang rendah pada daerah tertentu telah menunjukkan pembangunan kesehatan yang belum berhasil, dan semakin besar angka harapan hidup semakin menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah wajib diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Hal ini juga didukung oleh Ataguba (2013) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa peningkatan kesehatan akan mengurangi kemiskinan. Sebuah studi yang cocok ditemukan oleh Mariyanti dkk (2017) di mana membahas kesehatan akan memiliki ekonomi yang “sehat” untuk mendapatkan terjemahan yang lebih tinggi. Hal berbeda juga ditemukan oleh Biswajit dan Mukhopadhyay (2013) dalam penelitiannya tentang peningkatan kesehatan dalam pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh kapasitas lokal, politik, dan pelayanan kesehatan agar tidak menambah kemiskinan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan peningkatan di bidang kesehatan, akan memiliki arti penting yang signifikan pada tingkat kemiskinan, dalam mengurangi tingkat kemiskinan juga terkait dengan faktor-faktor seperti kapasitas lokal, politik, dan peningkatan layanan kesehatan yang meningkatkan hasil pada angka harapan hidup tingkat kemiskinan.

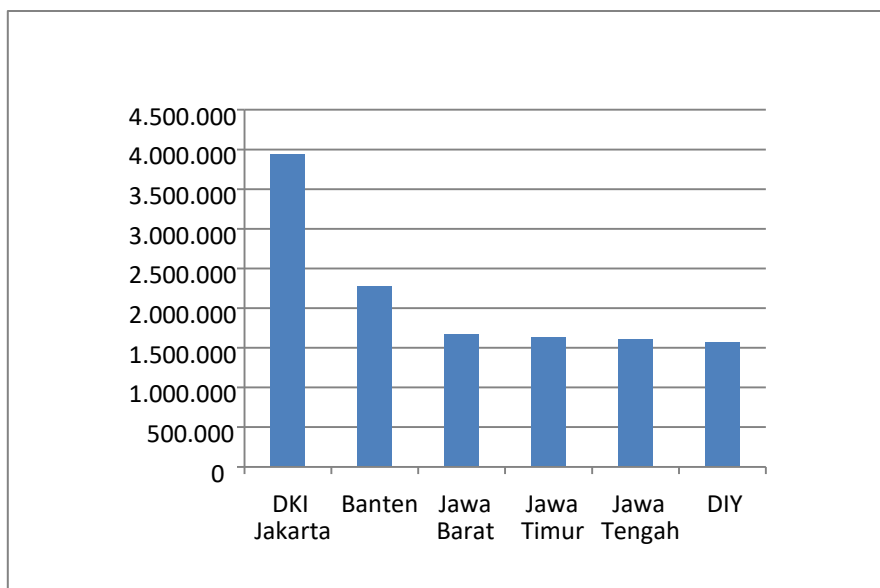
Faktor lainnya yang bisa menyebabkan kemiskinan yaitu kurangnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan. Pendapatan yang dimiliki tergantung pada pendapatan yang telah dimiliki. Semakin tinggi pendapatan, semakin mudah bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dan sebaliknya semakin rendah pendapatan yang diterima, semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Penghasilan yang biasanya diperoleh dari pekerjaan disebut upah. Pemerintah telah menetapkan kebijakan tingkat upah yang dikenal sebagai upah minimum. Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Untuk mencegah keluarga miskin dari perangkap kemiskinan, pemerintah menetapkan upah minimum yang lebih tinggi dari upah pasar. Upah minimum

mempengaruhi distribusi pendapatan dan dengan demikian dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi kemiskinan (Muller dan Stainer, 2008).

Upah minimum cenderung meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, ada efek negatif dari upah minimum yang diderita oleh orang-orang yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan kondisi pasar kerja, seperti perempuan pekerja, pekerja muda, dan pekerja berpendidikan rendah (SMERU, 2001).

Setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat upah minimum yang berbeda-beda yang ditetapkan oleh gubernur masing-masing provinsi. Upah minimum pemerintah daerah menjadi patokan atau batasan yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Oleh sebab itu, perusahaan tak boleh membayar upah apabila dibawah upah minimum yang sudah ditetapkan. Hal tersebut bisa melanggar yang telah diatur dan sudah dibuat serta melanggar hak untuk para pekerja. Upah minimum yang sudah dibuat bisa mengurangi kemiskinan apabila, ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup dan kesejahteraan pekerja.

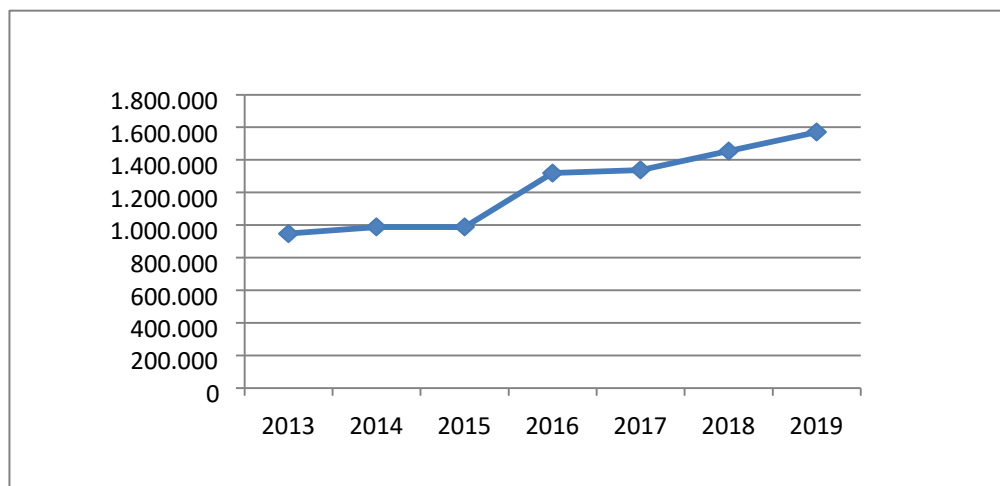


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

GAMBAR 1. 6
Upah Minimum Tiap Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019

Gambar di atas adalah data upah minimum provinsi tepat di Pulau Jawa pada tahun 2019. Bisa dilihat bahwasannya upah minimum provinsi D.I Yogyakarta masih terbelang paling rendah diantara provinsi-provinsi yang lainnya di Pulau Jawa. Posisi pertama yang mempunyai upah minimum provinsi tertinggi di Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan upah minimum provinsi. sebesar Rp.3.940.972. Urutan kedua yaitu provinsi Banten dengan upah minimum provinsi sebesar Rp.2.267.990.

Kemudian nomor ketiga dan seterusnya jatuh kepada Jawa-Barat dengan upah minimum provinsi sebesar Rp.1.668.372. Jawa-Timur sebesar Rp.1.630.059. Lalu Jawa-Tengah sebesar Rp.1.605.396. Dan di urutan terakhir provinsi D.I Yogyakarta dengan upah minimum provinsi sebesar Rp.1.570.922. Wilayah D.I Yogyakarta adalah Wilayah yang mempunyai upah minimum provinsi terendah sepulau Jawa.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

GAMBAR 1. 7
Upah Minimum Kota/Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta
tahun 2013-2019

Upah minimum kota/kabupaten di provinsi D.I Yogyakarta pada tujuh tahun terakhir cenderung mengalami lonjakan yang cukup signifikan disetiap tahunnya, walaupun pada tahun 2015 belum terjadi peningkatan yang konstan. Di tahun 2013 upah minimum kota/kabupaten D.I Yogyakarta sebesar Rp.947.114. Pada tahun 2014 dan 2015 upah minimum kota/kabupaten D.I Yogyakarta sebesar Rp.988.500. Dan pada tahun 2016-2019 upah minimum kota/kabupaten D.I Yogyakarta mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Serta di tahun 2019 Upah minimum D.I Yogyakarta sebesar Rp.1.570.922,00

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian di Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota, karena keterbatasan data peneliti lain kebanyakan menggunakan Negara atau Pulau. Pada penelitian ini memilih untuk menggunakan 5 kabupaten di

Yogyakarta. Selain itu penelitian ini menggunakan 4 variabel dependen dan variabel Independen yang jarang di gabungkan oleh peneliti lainnya, tapi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan upah minimum kota/kabupaten. Perbedaan lainnya terletak dari metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan regresi data panel yang dimana kebanyakan peneliti melakukan penelitian mereka dengan metode regresi linear berganda, VAR, ECM, VECM dan lain sebagainya. Dengan metode data panel ini, maka dapat kita lihat kabupaten/kota mana yang sangat memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di D.I Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan upah minimum kota terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2019”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?

3. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan upah minimum kabupaten/kota secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?
3. Untuk menganalisis pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?
4. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?

5. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan upah minimum kabupaten/kota secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan, namun penelitian ini juga dilakukan agar memiliki manfaat bagi orang banyak. Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan dalam pengembangan ilmu atau manfaat di bidang teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lainnya. Karena pada penelitian ini menggunakan variabel yang digunakan yaitu variabel tingkat kemiskinan sehingga hanya ditemukan cukup sedikit referensi dari variabel ini.

2. Manfaat di bidang praktik

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan juga untuk mendukung pendapat apakah pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan upah minimum kota/kabupaten ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.

3. Manfaat untuk pengambilan keputusan dan atau kebijakan

Bagi kalangan pemerintahan, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk menciptakan suatu kebijakan. Dan juga bisa digunakan untuk pengontrolan investasi lokal di Provinsi D.I Yogyakarta terutama pada investasi asing langsung, karena ketika pemerintah mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi

tingkat kemiskinan, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan tingkat kemiskinan ataupun menurunkan tingkat kemiskinan ini.